

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Uraian dari hasil penelitian, Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Kota Padang ini, masih belum mencapai pembangunan yang inklusif dikarenakan masih ada variabel yang belum terpenuhi dari Perencanaan partisipatif dalam Wicaksono dan Sugiarto. Hal ini bisa dilihat dari Kriteria wicaksono dan sugiarto dalam perencanaan partisipatif Ketika terfokus kepada kepentingan Masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas masih kurang memperhatikan disabilitas, karena masih ada kelurahan yang belum terdata memiliki disabilitas dan setiap tahunnya masih orang yang itu-itu saja sekedar mengikuti forum musrenbang dan terlihat hanya formalitas saja dalam pemenuhan keterlibatan disabilitas seperti musrenbang khusus disabilitas yang hanya dilakukan sekali pada tahun 2021. Dan masih banyak kendala dan hambatan yang terdapat dalam penyampaian usulan Ketika mengikuti forum seperti tidak tersedianya penterjemah Bahasa isyarat, kemudian adanya running text, layout, ataupun videotronk bagi yang bagi buta tidak ramah disabilitas. Dari segi Sinergitas mengenai keterlibatan disabilitas masih sekedar formalitas dan yang diundang yang rutin mengikuti kegiatan tersebut. Dari segi kerjasama antar wilayah administrasi dan geografi masih terdapat hambatan bagi penyandang disabilitas dalam penyampaian usulan di tingkat kecamatan, kurangnya interaksi antar stakeholder yang dapat mempengaruhi pemilihan prioritas Pembangunan. Walaupun pembangunangungan melanjutkan pembangunan yang ada, sedang dan akan

dibangun namun masih banyak bangunan dan tempat wisata yang belum ramah disabilitas seperti toilet masjid dan halte trans padang yang belum meratanya akses untuk disabilitas bahkan masih membahayakan. Masih kurangnya keefektifan Pembangunan yang sudah dilakukan di Kota Padang yang bisa dirasakan Bersama oleh Penyandang disabilitas. Peraturan dalam perencanaan pembangunan sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Padang akan tetapi keefektifan dan efisien untuk bisa dinikmati Bersama oleh penyandang disabilitas masih jauh dari inklusifitas.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan. Maka peneliti memberikan saran bagi pemerintah Kota Padang yang di harapkan dapat meningkatkan inklusivitas dan efektivitas perencanaan pembangunan bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata dan berkelanjutan. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Perluasan Partisipasi: Pemerintah perlu meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. Ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan lebih banyak forum musyawarah yang berfokus pada kebutuhan dan aspirasi mereka serta memastikan kehadiran mereka tidak hanya menjadi formalitas.
2. Penyediaan Fasilitas Ramah Disabilitas: Prioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti toilet publik yang dapat diakses, fasilitas transportasi yang layak, dan tempat wisata yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

3. Aksesibilitas Komunikasi: Diperlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas komunikasi dalam forum musyawarah, seperti menyediakan penterjemah bahasa isyarat, teks berjalan, atau materi dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas
4. Peningkatan Interaksi Stakeholder: Pemerintah perlu mendorong interaksi yang lebih aktif antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat umum, untuk memastikan kebutuhan penyandang disabilitas diakomodasi dengan baik dalam prioritas pembangunan.
5. Evaluasi Regulasi: Perlu dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang telah ada untuk memastikan keefektifan dan keinklusifan implementasinya bagi penyandang disabilitas. Jika diperlukan, revisi atau perubahan peraturan dapat dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan pembangunan.

